

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Harjoto Dan Ibnu Santoso, Yogyakarta: Jajasan Badan Penerbit Gajah Mada. Google Scholar diakses pada tanggal 24-01-2024
- Buku III KUHPerdata
- Tim politika ,informasi dan transaksi elektronik penerbit Anak hebat Indonesia tahun 2017
M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, h.66. Undang-undang nomor 36 tahun 1999
- Ding, Julian. (1999). E-commerce: Law & practice. Sweet & Maxwell Asia. Google Scholar diakses pada tanggal 24-01-2024
- Electronic Commerce. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 8(16), 42–57. Google Scholar diakses pada tanggal 24-01-2024
- Kantaatmadja, Mieke Komar. (2002). Pengaturan Kontrak untuk Perdagangan Elektronik (eContract). Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I, Jakarta, Elips II. Google Scholar diakses pada tanggal 24-01-2024
- Kantaatmadja, Mieke Komar. (2002). Pengaturan Kontrak untuk Perdagangan Elektronik (eContract). Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I, Jakarta, Elips II. Google Scholar diakses pada tanggal 24-01-2024
- Khairandy, Ridwan. (2001). Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi
- Makarim, Edmon. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(4), 508–570. Google Scholar diakses pada tanggal 24-01-2024
- Makarim, Edmon. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi
- Mamitoho, Refly Aditia. (2014). Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. LEX ET SOCIETATIS, 2(1). Google Scholar diakses pada tanggal 24-01-2024
- Pasal 1338 KUHPerdata: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Huala Adolf, 2006, Hukum Perdagangan Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.168. Ibid hlm. 172
- Paton, G. W. (1956). Textbook Of Jurisprudance Book VI, diterjemahkan oleh G. Sodarsono, Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(4), 508–570. Google Scholar diakses pada tanggal 24-01-2024
- Peter Mahmud Marzuki, Op.cit Miriam Daruz Badrul Zaman, 1991, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81.

Roberto Aaron, Maurizio Decina, Riccardo Skillen, 1999, Electronic Commerce: Enablers and Implications, IEEE Communications Magazine, hlm. 47

Subekti, 1992, Hukum Perjanjian, Cetakan 14, PT. Internusa, Jakarta, hlm.1.

Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum ; Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm.127

UU ITE diundangkan tanggal 21 April 2008, mengikuti ketentuan Pasal 54 ayat (2) maka seharusnya pada maksimal bulan April 2010, semua Peraturan Pemerintah yang diamanahkan sudah harus ditetapkan.

Jurnal

<https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama> Diakses pada tanggal 18-01-2024

<https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-elektronik-pada-hukum-acara-perdata> diakses pada tanggal 18-01-2024

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hukum+pembuktian+hendri+jayadi&btnG= Diakses pada tanggal 19-01-2024

PROF. Dr. ACHMAD ALI dan DR .WIWIE HERYANI. “Hukum Pembuktian Perdata hlm 15

<https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/view/723> diakses pada tanggal 19-01-2024

<https://repository.uin-suska.ac.id/7116/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 19-01-2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f> Diakses pada tanggal 21-01-2024

R.Subekti,, Op.Cit. hlm.45

<https://kepegawaian.polije.ac.id/undang-undang--uu--tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik> diakses pada tanggal 22-01-2024

Peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 82 tahun 2012

<https://kominfo.kotabogor.go.id/asset/file/sop/buku-profile-kominfo11.pdf> diakses pada tanggal 22-01-2024

<https://bakai.uma.ac.id/2022/05/18/apa-itu-hukum-perikatan/> diakses pada tanggal 22-01-2024

<https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya> diakses pada tanggal 22-01-2024